



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



DR. BIMA ARYA
WAKIL MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN REPRESENTASI POLITIK



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



PEMISAHAN PEMILU : SOLUSI ATAU MASALAH BARU?

MOMENTUM PERUBAHAN: PROLEGNAS 2026 & VISI KODIFIKASI

THE MANDATE



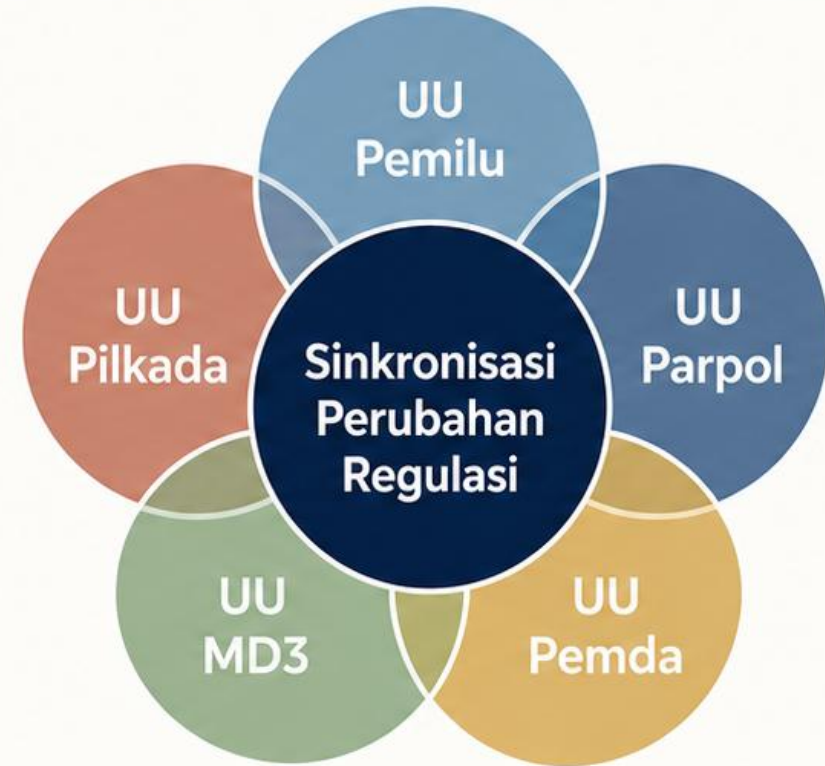
**RUU Perubahan UU No. 7/2017
menjadi Prioritas Prolegnas 2026
(Inisiatif DPR RI).**

“

“Amanat RPJPN 2025-2045 mewajibkan kodifikasi Undang-Undang mengenai Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah untuk perbaikan kualitas demokrasi.”

”

HARMONISASI REGULASI



**Target: Menyatukan pilar-pilar regulasi
yang saat ini tumpang tindih.**

KERANGKA PERUBAHAN & BATAS WAKTU KRITIS

TUJUAN PERUBAHAN



PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL



PENINGKATAN KUALITAS REPRESENTASI



PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN



OTONOMI DAERAH EFEKTIF



MEMPERKOKOH INTEGRASI BANGSA

FAKTOR PERTIMBANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



EVALUASI PEMILU SEBELUMNYA



MASUKAN PEMERHATI



EFISIENSI BIAYA



BATAS WAKTU



BEBERAPA HAL YANG PERLU DIANTISIPASI



Okt 2026 - Seleksi KPU & Bawaslu
(Tim Seleksi dibentuk 6 bulan sebelumnya)

6 Bulan sebelum berakhir harus sudah dibentuk Tim Seleksi

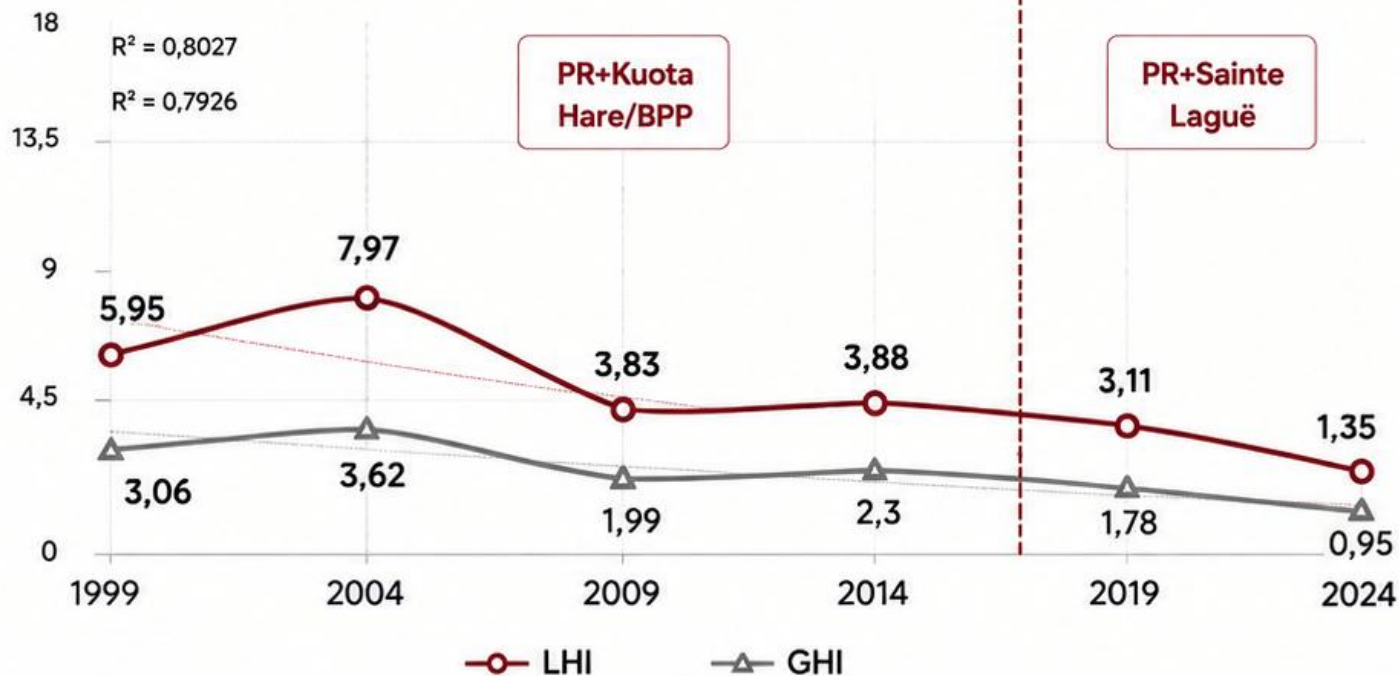


Juni 2027 - Tahapan Pemilu 2029 Dimulai
(20 bulan sebelum pemungutan)

Dimulai 20 Bulan sebelum hari pemungutan suara

Tren Pemilu 1999–2024

Rumus konversi suara kita sudah nyaris sempurna.
Perlu pembenahan di aspek hulu.



CATATAN KRITIS:

Prioritas RUU ini membenahi tiga hal di hulu: mekanisme kandidasi parpol, biaya politik tinggi dan money politics, serta meminimalisir suara terbuang.



1,35%

Disproporsionalitas LHI 2024 — terendah dalam sejarah pemilu kita



7,29

Partai efektif (ENPP) di DPR: masih menunjukkan sistem multipartai ekstrem (terfragmentasi) sejak 2004



11,3%

PR terbesar: Suara sah terbuang di ambang batas atau ± 17 juta suara.



7,57%

Volatilitas pemilih: pilihan makin ajeg, namun partai belum melembaga.

Tantangan 2029: *shifting generation* dan fenomena “loncat partai”.

PENCALEG-AN DINI

01

PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA LEBIH AWAL



- ✓ Memberikan waktu lebih panjang untuk **menjaring dan menilai calon potensial**.
- ✓ Memungkinkan partai mempersiapkan **strategi dan peta elektoral** lebih matang.
- ✓ Mendorong **keterbukaan dan kompetisi sehat** sejak awal.

02

KADERISASI INTERNAL SEBAGAI FONDASI PARTAI



- ✓ Menyiapkan kader berkualitas dengan **kompetensi, integritas, dan komitmen**.
- ✓ Menjaga **kesinambungan kepemimpinan** partai dan keberlanjutan perjuangan.
- ✓ Mengurangi ketergantungan pada **figur instan** dan transaksional.



Pencaleg-an dini yang terencana dan berbasis kaderisasi **memperkuat kualitas kandidat dan masa depan partai.**

Dua Arena Legitimasi, Satu Jembatan yang Belum Dibangun

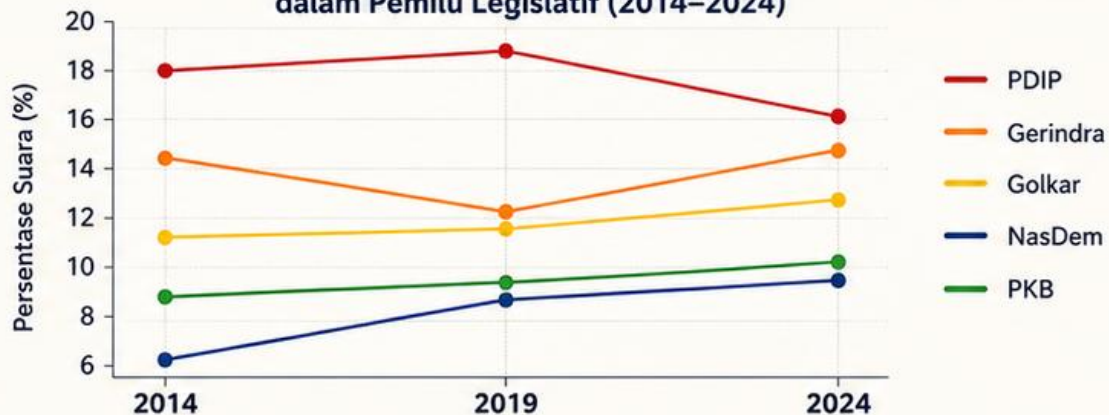
Pemisahan pemilu nasional-lokal dapat mengubah tata kelola pemerintahan. Putusan MK tidak memberikan penjelasan yang memadai dalam memaknai keserentakan pemilu yang bertujuan untuk penguatan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi.



APA YANG DIPUTUS · 26 Juni 2025

Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD) dipisah dari Pemilu Daerah (DPRD, kepala daerah), dengan jeda 2–2,5 tahun.

Tren Perolehan Suara Partai Pengusung Capres dalam Pemilu Legislatif (2014–2024)



Yang Perlu Menjadi Perhatian dan Dikaji Lebih Mendalam

- 1 Bagaimana dengan pertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 bahwa Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali
- 2 Bagaimana masa jabatan kepala daerah
- 3 Bagaimana masa jabatan DPRD
- 4 Bagaimana menyikapi potensi jatuh bangun perencanaan daerah akibat penyesuaian RPJMN dan RPJMD
- 5 Bagaimana menyikapi potensi disharmoni pusat dan daerah
- 6 Bagaimana menyikapi potensi polarisasi berkepanjangan



Mayoritas parlemen dibangun setelah pemungutan suara lewat koalisi, bukan ekor jas.



Daerah Pemilihan: Kewenangan Berpindah, Instrumen Belum Ada

Kewenangan penataan dapil yang diberikan kepada KPU perlu dilengkapi dengan instrumen yang lebih operasional



Catatan:

- a. Masih terdapat Proporsi/representasi jumlah kursi dibandingkan dengan jumlah penduduk antar Dapil yang berbeda-beda.
- b. Belum ada mekanisme penghitungan jumlah kursi dan dapil yang ideal untuk pemilihan anggota DPR RI
- c. Potensi perubahan jumlah kursi akibat penambahan jumlah penduduk dan perubahan Kebijakan Pengalihan Ibu Kota (DKI Jakarta) dan (Kaltim) dan Belum adanya pengaturan dan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan di IKN **(Kebijakan ini sangat bergantung pada Penetapan Perpres Pemindahan IKN)**
- d. Masih terdapat Pembentukan dapil yang tidak utuh (Dapil Locat) terdapat 41 Dapil yang tidak utuh
- e. Opsi Pengaturan Daerah Pemilihan Luar Negeri tersendiri



EMPAT INSTRUMEN YANG HARUS DIATUR DALAM UU melengkapi prinsip pendapilan Pasal 185:

1



Metode alokasi kursi ke dapil

2



Batas maksimum deviasi harga kursi

3



Indeks disproposionalitas

4



Time interval untuk re-alokasi kursi berbasis sensus

Pilihan Sistem Pemilu bukan pertentangan Terbuka vs Tertutup vs Campuran

Problem hulu yang harus dibenahi adalah mekanisme kandidasi internal parpol untuk pencalonan legislatif yang dipilih secara demokratis dengan parameter yang jelas dan terukur.

Kriteria Evaluasi	Proporsional Terbuka	Proporsional tertutup	Campuran (MMP)
 Kedaulatan dan Representasi	- Sudah tinggi (GHI 0,95%) - Kendali pemilih mutlak	- Proporsionalitas setara. - Kendali pemilih atas figur sangat rendah (berpindah ke partai)	- Proporsionalitas disesuaikan. - Suara terpecah: representasi figur distrik & identitas partai nasional.
 Fokus Kompetisi dan Pelembagaan Partai	- Persaingan intra-partai sangat tinggi - Melemahkan kohesi partai	- Persaingan antar-partai berbasis program/ideologi. - Memperkuat pelembagaan, disiplin, dan kohesi fraksi.	- Menggabungkan kekuatan figur lokal dengan disiplin partai nasional. - Tingkat pelembagaan moderat.
 Risiko utama (Trade-off)	Personalisasi, biaya kampanye tinggi, klientelisme, politik uang	Menguatnya oligarki kepartaian, elitisme, dan praktik transaksional ("beli nomor urut")	Kompleksitas penerapan, tingginya risiko suara tidak sah akibat kebingungan pemilih
 Prasyarat mutlak keberhasilan	Demokrasi internal partai & penegakan hukum politik uang yang luar biasa ketat & audit dana kampanye individual.	Demokratisasi internal partai & transparansi penyusunan daftar calon secara meritokratik.	Demokrasi internal partai & kesiapan teknis penyelenggara (KPU) tingkat tinggi & literasi politik pemilih yang sangat matang.

TRANSISI PENATAAN SDM KESERENTAKAN REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU



Rekrutmen penyelenggara adalah infrastruktur demokrasi. Seleksi dan pelantikan KPU-Bawaslu harus tuntas sebelum tahapan inti dimulai, dengan penyesuaian masa jabatan yang dilakukan sekali saja (*one-off transition*).

TIMELINE REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU 2026–2028



Penggunaan Teknologi dalam Pemilu



EKONOMI BAYANGAN KAMPANYE

Sejumlah partai yang kampanyenya digital secara masif di pemilu 2024 justru melaporkan pengeluaran nol pada pos yang berdekatan dengan aktivitas siber. Rezim pelaporan kita gagal menangkap belanja digital.



PELAJARAN SIREKAP: SISTEM + KEPERCAYAAN

Kesalahan pembacaan data di ratusan ribu TPS dan status hukum data yang tidak tegas mengubah instrumen transparansi menjadi sumber kegaduhan.

Lima arah pengaturan



Transparansi belanja digital

Pengaturan dan standardisasi untuk pemengaruh, KOL, dan homeless media.



Keterbukaan iklan

Platform wajib membuka pustaka iklan politik yang dapat diaudit.



Pelabelan AI

Pelabelan wajib konten AI; deepfake manipulatif dilarang.



Kedaulatan data pemilih

Pemrofilan tunduk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.



Standardisasi sistem/ TI penyelenggara pemilu

Sistem KPU-Bawaslu-DKPP ditautkan lewat standar bersama, bukan dilebur.



KEBUTUHAN TRANSFORMASI MENYELURUH

**HARMONISASI TOTAL ANTARA PUTUSAN MK, EFISIENSI OPERASIONAL, DAN
PENYEDERHANAAN SISTEM DEMI MENJAGA KUALITAS DEMOKRASI SUBSTANTIF**



**KEPASTIAN
HUKUM**



**EFISIENSI
OPERASIONAL**



**SISTEM
SEDERHANA DAN
TERINTEGRASI**



**DEMOKRASI
SUBSTANTIF**



**KEPERCAYAAN
PUBLIK**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri